

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah (DPPKD) Salah satu instansi yang menerapkan teknologi informasi sebagai penyalur informasi di dalam menerbitkan laporan-laporan yang akan di hasilkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat. Instansi ini berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pengelolaan informasi agar cepat dan tepat, khususnya untuk memajukan instansi dalam memahami perkembangan teknologi informasi serta memberikan informasi mengenai terbitnya APBD.

Salah satu penunjang pada instansi pemerintah ini adalah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang mempunyai program untuk menyediakan data-data mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, informasi tentang kegiatan – kegiatan yang di laksanakan oleh PEMDA selama satu tahun anggaran dari januari – desember, serta kondisi dari aset daerah, kepegawaian/ aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan, mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik dan memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Mengingat pentingnya informasi dalam SIMDA, yang berupa informasi penting mengenai terbitnya atau tersusunnya APBD, pembuatan SPP (surat permintaan pembayaran) dan pencarian dana. Maka kebijakan tentang keamanan informasi harus mencakup hal tentang prosedur pengendalian Hak akses dan dokumen terkait kebijakan keamanan, prosedur pengendalian rekaman, prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan terjadinya kerusakan pada lingkungan fisik dan prosedur pemantauan penggunaan fasilitas teknologi informasi.

Adapun kondisi permasalahan yang terjadi di bagian SIMDA khususnya dalam mengakses suatu data yang seharusnya terlindungi, Dapat dilihat oleh pegawai lain di bagian yang sama namun sebenarnya pegawai tersebut tidak memiliki akses untuk melihat informasi khusus yang bukan haknya yang akan berdampak pada hilangnya data atau pencurian data yang sangat merugikan DPPKD. Adapun ancaman lain seperti pegawai belum atau tidak memahami aturan dan tanggung jawab keamanan sistem informasi seperti penyalahgunaan *password* yang dapat mengancam kerahasiaan data di DPPKD. Selain itu dikhawatirkan dapat berdampak pada terjadinya penyalahgunaan fasilitas informasi yang merugikan DPPKD. Kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas seperti pemeliharaan terhadap *hardware* yang ada serta kurangnya pengamanan di lingkungan ruang server, pemrosesan informasi yang terganggu oleh *virus* dapat menyebabkan sistem menjadi sering *hang*, jaringan *down*, yang menghambat kinerja instansi. DPPKD juga belum memiliki kebijakan terhadap ancaman virus. Ancaman virus itu dapat menimbulkan gangguan kinerja sistem informasi bahkan dapat menghambat terbitnya informasi penerbitan surat permintaan pembayaran dan pencairan dana. Ancaman seperti ini akan berdampak

buruk bagi instansi DPPKD, maka untuk itu diperlukan audit keamanan sistem informasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat agar mampu menjaga asetnya untuk kelangsungan proses bisnisnya, data dan informasi merupakan aset yang penting bagi DPPKD dan butuh penanganan khusus agar terjaga keamanannya.

Berdasarkan permasalahan yang ada di DPPKD khususnya bagian SIMDA, maka ada beberapa klausul yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan audit keamanan sistem informasi yaitu:

1. Keamanan Sumber Daya Manusia (Klausul 8)
2. Keamanan Fisik dan Lingkungan (Klausul 9)
3. Kontrol Akses (Klausul 11)

Penelitian ini juga menggunakan referensi yang ada pada standar ISO 27002:2005 sebagai standar yang paling baru diterapkan menggantikan standar lama ISO 17799:2005. ISO 27002 menyediakan rekomendasi *best practice* terhadap manajemen keamanan informasi untuk digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk proses implementasi, dan pemeliharaan *Information Security Management Systems* (ISMS) pada suatu organisasi.

Dengan menggunakan ISO 27002 dinas DPPKD bertujuan untuk mengidentifikasi masalah manajemen resiko terhadap keamanan informasi yang ada di dinas DPPKD serta meminimalisasi munculnya potensi resiko pada keamanan informasi, penerapan manajemen keamanan informasi pada DPPKD dilakukan untuk mendapatkan temuan yang berpotensi menjadi resiko terhadap keamanan.

Dengan adanya penelitian tentang audit keamanan sistem informasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka di harapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan kelemahan keamanan informasi yang ada di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Lombok Barat.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Cara Merencanakan Audit Keamanan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan standar ISO 27002:2005.
2. Bagaimana Cara Menerepkan Audit Keamanan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan standar ISO 27002:2005.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka pembatasan masalah dalam keamanan sistem informasi ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Aplikasi sistem informasi yang diaudit adalah sistem informasi Manajemen daerah (SIMDA) Lombok barat
2. Standar pelaksanaan audit keamanan sistem informasi mengacu pada ISO 27002:2005.
3. Periode data yang digunakan untuk audit keamanan sistem informasi mulai dari Januari 2010 – Desember 2014.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Membuat perencanaan audit Keamanan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan standar ISO 27002:2005.
2. Melaksanakan audit keamanan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menggunakan standar ISO 27002:2005.

1.5 Mamfaat

Berdasarkan tujuan audit keamanan sistem informasi maka diperoleh beberapa manfaat untuk Dinas Pengelolaan dan pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lombok Barat.

1. Untuk membantu mengetahui ketidaksesuaian informasi berdasarka hasil bukti dan informasi yang ada.
2. Memberikan kontribusi untuk meningkatkan keamanan informasi dengan standar ISO 27002:2005.

Memperoleh acuan untuk menangani masalah yang ada di Dinas Pengelolaan dan pendapatan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lombok Barat:

1.6 Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah serta batasan terhadap masalah yang akan dibahas, tujuan dari pembahasan masalah yang diangkat, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan audit keamanan sistem informasi, diantaranya yaitu penjelasan tentang audit, sistem informasi, audit keamanan sistem informasi, standar sistem manajemen keamanan informasi, ISO/IEC 27002:2005.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam audit keamanan sistem informasi pada bagian SIMDA di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan daerah Lombok Barat yang meliputi perencanaan audit, persiapan audit, pelaksanaan audit serta pelaporan audit.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang analisa dan evaluasi hasil temuan serta rekomendasi dari kegiatan audit keamanan sistem informasi pada bagian SIMDA di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan daerah Lombok Barat.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, serta saran sehubungan dengan adanya kemungkinan pengembangan sistem pada masa yang akan datang.

